



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016, kebutuhan Pupuk Bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ~~pada~~ huruf a, dan huruf-b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
11. Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
19. Peraturan Menteri Prindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
28. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merk untuk Pupuk Bersubsidi;
29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
30. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
31. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
32. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
4. Direktur Jenderal adalah Pejabat Eselon I dilingkungan Menteri Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
5. Camat adalah Camat se-Kabupaten Mandailing Natal.
6. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Mandailing Natal.

7. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Mandailing Natal.
8. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
9. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
10. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah.
11. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
12. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk Kebutuhan Kelompok Tani dan/atau petani disektor pertanian.
13. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah Alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Kabupaten yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten.
14. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
15. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
16. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
17. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
19. Pelaksana Subsidi adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
20. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
21. Penyalur di Lini IV adalah Pergecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
22. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkatt RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani yang merupakan alat pesanan Pupuk Bersubsidi kepada gabungan Kelompok Tani atau penyalur sarana produksi pertanian.

23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten Mandailing Natal.

BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas:
 - a. Pupuk An-Organik; dan
 - b. Pupuk Organik;yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Urea;
 - b. SP 36;
 - c. ZA; dan
 - d. NPK.

BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani dan/atau Petambak yang telah bergabung dalam Kelompok Tani dan menyusun RDKK dengan ketentuan:
 - a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musin tanam;
 - b. Petani yang melakukan usaha tani diluar bidang tanaman pangan dengan total luasan paling banyak 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
 - c. Petambak dengan total luasan paling banyak 1 (satu) hektar setiap musin tanam.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan mempertimbangkan:
 - a. usulan kebutuhan yang diajukan oleh BP3K dan/atau Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas;
 - b. rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas dan diketahui oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah;
 - c. penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan
 - d. alokasi anggaran subsidi Pupuk Tahun 2016.

- (3) Rincian kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Terhadap kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati menetapkan alokasi per Kecamatan berdasarkan sub sektor sesuai dengan kebutuhan yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani/Kelompok Tani dilakukan secara proporsi antara RDKK dan alokasi yang tersedia.

Pasal 6

Unit Pelayanan Teknis Dinas bersama Unit Pelayanan Teknis Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Ketahanan di Kecamatan wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai dengan luas areal usaha tani dan kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan Kelompok Tani di wilayahnya.

BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan yang ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi atau realokasi antar Kabupaten/Kota sebagai akibat realokasi antar Provinsi wajib ditindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar Kecamatan yang ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Kecamatan yang mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Apabila alokasi pupuk Bersubsidi disuatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi diwilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun melalui penetapan realokasi.

BAB V
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota Pembelian kepada Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani; dan
 - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (2) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan oleh petugas penyuluh di wilayah tanggungjawabnya.
- (4) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP Kabupaten.
- (5) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016 melaporkan hasil Verifikasi dan Validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi setiap bulan kepada Direktur Jenderal.
- (6) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VI
HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea =Rp.1.800,- per kg;
 - b. Pupuk SP-36 =Rp.2.000,- per kg;
 - c. Pupuk ZA =Rp.1.400,- per kg;
 - d. Pupuk NPK =Rp.2.300,- per kg; dan
 - e. Pupuk Organik =Rp.500,- per kg.
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani pada Penyalur di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg; dan
 - e. Pupuk Organik = 40 kg.

Pasal 11

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran, Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (*pink*) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (*orange*).

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani, Petambak dan/atau kelompok Tani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani setiap bulan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) KPPP Kabupaten Mandailing Natal wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 14

- (1) KPPP Kabupaten Mandailing Natal wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

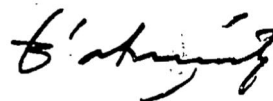
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 11 Januari 2016

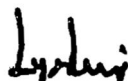
BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 11 Januari 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,



MHD. SYAFE'I LUBIS

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR 1 TAHUN 2016

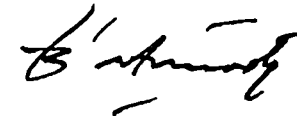
TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
MENURUT SUB SEKTOR PERTANIAN DAN JENIS PUPUK**

| NO | SUB SEKTOR | JENIS PUPUK (TON) | | | | |
|--------|---------------------------------|-------------------|---------|-----|-------|---------|
| | | UREA | SP - 36 | ZA | NPK | ORGANIK |
| 1 | Tanaman Pangan dan Hortikultura | 3,971 | 329 | 359 | 876 | 872 |
| 2 | Perkebunan | 192 | 79 | 185 | 700 | 171 |
| 3 | Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Perikanan Budidaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 4,163 | 408 | 544 | 1,576 | 1,043 |

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

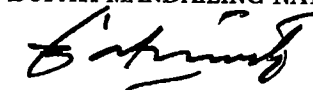
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO | KECAMATAN | PER - BULAN / KECAMATAN (TON) | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| | | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | TOTAL |
| 1 | SIABU | 50 | 185 | 105 | 85 | 85 | 5 | 5 | 115 | 115 | 115 | 55 | 0 | 920 |
| 2 | BUKIT MALINTANG | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 3 | PANYABUNGAN UTARA | 10 | 50 | 80 | 70 | 0 | 20 | 20 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 4 | PANYABUNGAN KOTA | 100 | 70 | 50 | 40 | 20 | 0 | 10 | 100 | 80 | 20 | 0 | 0 | 490 |
| 5 | PANYABUNGAN SELATAN | 25 | 35 | 25 | 25 | 23 | 13 | 10 | 44 | 34 | 11 | 5 | 0 | 250 |
| 6 | PANYABUNGAN TIMUR | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 7 | PANYABUNGAN BARAT | 25 | 35 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 15 | 0 | 0 | 145 |
| 8 | LEMBAH SORIK MARAPI | 50 | 70 | 20 | 10 | 0 | 0 | 25 | 65 | 10 | 10 | 0 | 0 | 260 |
| 9 | TAMBANGAN | 30 | 50 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 35 | 10 | 5 | 0 | 0 | 190 |
| 10 | KOTANOPAN | 200 | 50 | 25 | 0 | 0 | 150 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 11 | ULUPUNGKUT | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12 | MUARA SIPONGI | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 13 | BATANG NATAL | 45 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 14 | LINGGA BAYU | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 15 | NATAL | 20 | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 5 | 7 | 100 |
| 16 | BATAHAN | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 17 | MUARA BATANG GADIS | 15 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 18 | NAGA JUANG | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 70 |
| 19 | PAKANTAN | 10 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 20 | HUTABARGOT | 20 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 114 |
| 21 | PUNCAK SORIK MARAPI | 20 | 20 | 17 | 7 | 8 | 0 | 8 | 17 | 22 | 11 | 0 | 0 | 130 |
| 22 | RANTO BAEK | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 70 |
| 23 | SINUNUKAN | 10 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 |
| JUMLAH | | 730 | 777 | 466 | 272 | 136 | 195 | 276 | 606 | 400 | 228 | 70 | 7 | 4,163 |

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|--------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| | | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | |
| 1 | SIABU | 50 | 180 | 100 | 80 | 80 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 50 | 0 | 870 |
| 2 | BUKIT MALINTANG | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 3 | PANYABUNGAN UTARA | 10 | 50 | 80 | 70 | 0 | 20 | 20 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 4 | PANYABUNGAN KOTA | 100 | 70 | 50 | 40 | 20 | 0 | 10 | 100 | 80 | 20 | 0 | 0 | 490 |
| 5 | PANYABUNGAN SELATAN | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 40 | 30 | 10 | 5 | 0 | 220 |
| 6 | PANYABUNGAN TIMUR | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 7 | PANYABUNGAN BARAT | 25 | 35 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 15 | 0 | 0 | 145 |
| 8 | LEMBAH SORIK MARAPI | 50 | 70 | 20 | 10 | 0 | 0 | 25 | 65 | 10 | 10 | 0 | 0 | 260 |
| 9 | TAMBANGAN | 30 | 50 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 35 | 10 | 5 | 0 | 0 | 190 |
| 10 | KOTANOPAN | 200 | 50 | 25 | 0 | 0 | 150 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 11 | ULUPUNGKUT | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12 | MUARA SIPONGI | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 13 | BATANG NATAL | 45 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 14 | LINGGA BAYU | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 15 | NATAL | 20 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 68 |
| 16 | BATAHAN | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | MUARA BATANG GADIS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 18 | NAGA JUANG | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 70 |
| 19 | PAKANTAN | 10 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 20 | HUTABARGOT | 20 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 114 |
| 21 | PUNCAK SORIK MARAPI | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 115 |
| 22 | RANTO BAEK | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 23 | SINUNUKAN | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| JUMLAH | | 730 | 751 | 437 | 240 | 125 | 187 | 268 | 580 | 384 | 211 | 60 | 5 | 3,978 |

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO | KECAMATAN | PER - BULAN / KECAMATAN (TON) | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| | | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | TOTAL |
| 1 | SIABU | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 50 |
| 2 | BUKIT MALINTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PANYABUNGAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PANYABUNGAN KOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PANYABUNGAN SELATAN | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | PANYABUNGAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PANYABUNGAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LEMBAH SORIK MARAPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TAMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KOTANOPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ULUPUNKUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MUARA SIPONGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BATANG NATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LINGGA BAYU | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | NATAL | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 32 |
| 16 | BATAHAN | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | MUARA BATANG GADIS | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | NAGA JUANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PAKANTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | HUTABARGOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PUNCAK SORIK MARAPI | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | RANTO BAEK | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 23 | SINUNUKAN | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| JUMLAH | | 0 | 26 | 29 | 32 | 11 | 8 | 8 | 26 | 16 | 17 | 10 | 2 | 185 |

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAH ANGGARAN

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO | KECAMATAN | PER - BULAN / KECAMATAN (TON) | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| | | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | TOTAL |
| 1 | SIABU | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 35 |
| 2 | BUKIT MALINTANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | PANYABUNGAN UTARA | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 |
| 4 | PANYABUNGAN KOTA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 33 |
| 5 | PANYABUNGAN SELATAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 26 |
| 6 | PANYABUNGAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PANYABUNGAN BARAT | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | LEMBAH SORIK MARAPI | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 9 | TAMBANGAN | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 10 | KOTANOPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ULUPUNGKUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MUARA SIPONGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BATANG NATAL | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| 14 | LINGGA BAYU | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| 15 | NATAL | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 |
| 16 | BATAHAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 17 | MUARA BATANG GADIS | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 18 | NAGA JUANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PAKANTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | HUTABARGOT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 21 | PUNCAK SORIK MARAPI | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| 22 | RANTO BAEK | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 23 | SINUNUKAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| JUMLAH | | 38 | 37 | 36 | 37 | 44 | 30 | 38 | 40 | 29 | 27 | 27 | 25 | 408 |

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO | KECAMATAN | PER - BULAN / KECAMATAN (TON) | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| | | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | TOTAL |
| 1 | SIABU | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 35 |
| 2 | BUKIT MALINTANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | PANYABUNGAN UTARA | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 |
| 4 | PANYABUNGAN KOTA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 33 |
| 5 | PANYABUNGAN SELATAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 26 |
| 6 | PANYABUNGAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | PANYABUNGAN BARAT | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 15 |
| 8 | LEMBAH SORIK MARAPI | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 9 | TAMBANGAN | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 10 | KOTANOPAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ULUPUNGKUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | MUARA SIPONGI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | BATANG NATAL | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| 14 | LINGGA BAYU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 15 | NATAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | BATAHAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 17 | MUARA BATANG GADIS | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 |
| 18 | NAGA JUANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | PAKANTAN | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 20 | HUTABARGOT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 21 | PUNCAK SORIK MARAPI | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| 22 | RANTO BAEK | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 23 | SINUNUKAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | 32 | 30 | 29 | 29 | 37 | 24 | 31 | 1 | 23 | 22 | 22 | 17 | 329 |

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

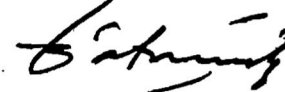
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO | KECAMATAN | PER - BULAN / KECAMATAN (TON) | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| | | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | TOTAL |
| 1 | SIABU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BUKIT MALINTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PANYABUNGAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PANYABUNGAN KOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PANYABUNGAN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PANYABUNGAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PANYABUNGAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEMBAH SORIK MARAPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TAMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KOTANOPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ULUPUNGKUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MUARA SIPONGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BATANG NATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LINGGA BAYU | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 15 | NATAL | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 |
| 16 | BATAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MUARA BATANG GADIS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | NAGA JUANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PAKANTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | HUTABARGOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PUNCAK SORIK MARAPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RANTO BAEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SINUNUKAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| JUMLAH | | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 79 |

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

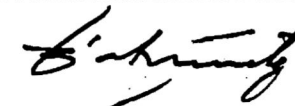
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO | KECAMATAN | PER - BULAN / KECAMATAN (TON) | | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|--------|---------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | | |
| 1 | SIABU | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | 38 | |
| 2 | BUKIT MALINTANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 3 | PANYABUNGAN UTARA | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | - | 48 | |
| 4 | PANYABUNGAN KOTA | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | |
| 5 | PANYABUNGAN SELATAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |
| 6 | PANYABUNGAN TIMUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | PANYABUNGAN BARAT | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 15 | |
| 8 | LEMBAH SORIK MARAPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 9 | TAMBANGAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 10 | KOTANOPAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | ULUPUNGKUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | MUARA SIPONGI | - | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | |
| 13 | BATANG NATAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 14 | LINGGA BAYU | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 30 | |
| 15 | NATAL | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 60 | |
| 16 | BATAHAN | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | |
| 17 | MUARA BATANG GADIS | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 35 | |
| 18 | NAGA JUANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | PAKANTAN | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | |
| 20 | HUTABARGOT | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
| 21 | PUNCAK SORIK MARAPI | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | |
| 22 | RANTO BAEK | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 30 | |
| 23 | SINUNUKAN | - | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 15 | 13 | 8 | 12 | 100 | |
| JUMLAH | | 38 | 49 | 44 | 45 | 40 | 40 | 47 | 47 | 53 | 55 | 48 | 38 | 544 | |

BUPATI MANDAILING NATAL,



LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANAGAN DAN HORTIKULTURA
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO | KECAMATAN | PER - BULAN / KECAMATAN (TON) | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|--------|---------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| | | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | |
| 1 | SIABU | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | 38 |
| 2 | BUKIT MALINTANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | PANYABUNGAN UTARA | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | - | 48 |
| 4 | PANYABUNGAN KOTA | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 5 | PANYABUNGAN SELATAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 6 | PANYABUNGAN TIMUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | PANYABUNGAN BARAT | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 15 |
| 8 | LEMBAH SORIK MARAPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 9 | TAMBANGAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 10 | KOTANOPAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ULUPUNGKUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | MUARA SIPONGI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | BATANG NATAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 14 | LINGGA BAYU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 20 |
| 15 | NATAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | BATAHAN | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 |
| 17 | MUARA BATANG GADIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 18 | NAGA JUANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | PAKANTAN | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 |
| 20 | HUTABARGOT | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 |
| 21 | PUNCAK SORIK MARAPI | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 10 |
| 22 | RANTO BAEK | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 30 |
| 23 | SINUNUKAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | 31 | 33 | 31 | 29 | 27 | 27 | 31 | 30 | 31 | 35 | 32 | 22 | 359 |

BUPATI MANDAILING NATAL,



LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PERKEBUNAN
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO | KECAMATAN | PER - BULAN / KECAMATAN (TON) | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| | | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | TOTAL |
| 1 | SIABU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | BUKIT MALINTANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | PANYABUNGAN UTARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | PANYABUNGAN KOTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PANYABUNGAN SELATAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | PANYABUNGAN TIMUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | PANYABUNGAN BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | LEMBAH SORIK MARAPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | TAMBANGAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | KOTANOPAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ULUPUNGKUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | MUARA SIPONGI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | BATANG NATAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | LINGGA BAYU | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10 |
| 15 | NATAL | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 60 |
| 16 | BATAHAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | MUARA BATANG GADIS | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 15 |
| 18 | NAGA JUANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | PAKANTAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | HUTABARGOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | PUNCAK SORIK MARAPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | RANTO BAEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | SINUNUKAN | - | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 15 | 13 | 8 | 12 | 100 |
| JUMLAH | | 7 | 16 | 13 | 16 | 13 | 13 | 16 | 17 | 22 | 20 | 16 | 16 | 185 |

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR TANAMAN PERTANIAN
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO | KECAMATAN | PER - BULAN / KECAMATAN (TON) | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| | | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | TOTAL |
| 1 | SIABU | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 8 | 10 | 7 | 8 | 120 |
| 2 | BUKIT MALINTANG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 3 | PANYABUNGAN UTARA | 10 | 24 | 10 | 15 | 12 | 15 | 18 | 11 | 15 | 10 | 8 | - | 148 |
| 4 | PANYABUNGAN KOTA | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 80 |
| 5 | PANYABUNGAN SELATAN | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 80 |
| 6 | PANYABUNGAN TIMUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | PANYABUNGAN BARAT | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 16 |
| 8 | LEMBAH SORIK MARAPI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 9 | TAMBANGAN | 8 | 13 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 |
| 10 | KOTANOPAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 11 | ULUPUNGKUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | MUARA SIPONGI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | BATANG NATAL | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 40 |
| 14 | LINGGA BAYU | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 52 |
| 15 | NATAL | 20 | 26 | 17 | 18 | 15 | 35 | 30 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 295 |
| 16 | BATAHAN | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 95 |
| 17 | MUARA BATANG GADIS | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 65 |
| 18 | NAGA JUANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | PAKANTAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 20 | HUTABARGOT | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 |
| 21 | PUNCAK SORIK MARAPI | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 22 | RANTO BAEK | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 |
| 23 | SINUNUKAN | 30 | 33 | 27 | 30 | 25 | 36 | 25 | 30 | 25 | 25 | 40 | 39 | 365 |
| JUMLAH | | 130 | 153 | 123 | 126 | 110 | 151 | 140 | 132 | 133 | 127 | 128 | 123 | 1,576 |

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN

LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO | KECAMATAN | PER - BULAN / KECAMATAN (TON) | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| | | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | TOTAL |
| 1 | SIABU | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 8 | 10 | 7 | 8 | 120 |
| 2 | BUKIT MALINTANG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 3 | PANYABUNGAN UTARA | 10 | 24 | 10 | 15 | 12 | 15 | 18 | 11 | 15 | 10 | 8 | - | 148 |
| 4 | PANYABUNGAN KOTA | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 80 |
| 5 | PANYABUNGAN SELATAN | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 80 |
| 6 | PANYABUNGAN TIMUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | PANYABUNGAN BARAT | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 16 |
| 8 | LEMBAH SORIK MARAPI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 9 | TAMBANGAN | 8 | 13 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 |
| 10 | KOTANOPAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 11 | ULUPUNGKUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | MUARA SIPONGI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | BATANG NATAL | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 40 |
| 14 | LINGGA BAYU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 |
| 15 | NATAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | BATAHAN | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 95 |
| 17 | MUARA BATANG GADIS | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 45 |
| 18 | NAGA JUANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | PAKANTAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 20 | HUTABARGOT | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 |
| 21 | PUNCAK SORIK MARAPI | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 22 | RANTO BAEK | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 |
| 23 | SINUNUKAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | 76 | 90 | 75 | 74 | 66 | 76 | 81 | 78 | 79 | 73 | 56 | 52 | 876 |

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PERKEBUNAN
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO | KECAMATAN | PER - BULAN / KECAMATAN (TON) | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|--------|---------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| | | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | |
| 1 | SIABU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | BUKIT MALINTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | PANYABUNGAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | PANYABUNGAN KOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | PANYABUNGAN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | PANYABUNGAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | PANYABUNGAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | LEMBAH SORIK MARAPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | TAMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | KOTANOPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | ULUPUNGKUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | MUARA SIPONGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | BATANG NATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | LINGGA BAYU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | NATAL | 20 | 26 | 17 | 18 | 15 | 35 | 30 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 295 |
| 16 | BATAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | MUARA BATANG GADIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 18 | NAGA JUANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | PAKANTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | HUTABARGOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | PUNCAK SORIK MARAPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | RANTO BAEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | SINUNUKAN | 30 | 33 | 27 | 30 | 25 | 36 | 25 | 30 | 25 | 25 | 40 | 39 | 365 |
| JUMLAH | | 54 | 63 | 48 | 52 | 44 | 75 | 59 | 54 | 54 | 54 | 72 | 71 | 700 |

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR TANAMAN PERTANIAN
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO | KECAMATAN | PER - BULAN / KECAMATAN (TON) | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| | | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | TOTAL |
| 1 | SIABU | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 60 |
| 2 | BUKIT MALINTANG | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 42 |
| 3 | PANYABUNGAN UTARA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 70 |
| 4 | PANYABUNGAN KOTA | - | 30 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 2 | 10 | 2 | 2 | - | 72 |
| 5 | PANYABUNGAN SELATAN | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 1 | 41 |
| 6 | PANYABUNGAN TIMUR | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 10 |
| 7 | PANYABUNGAN BARAT | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 70 |
| 8 | LEMBAH SORIK MARAPI | 7 | 12 | 7 | - | - | - | 7 | 12 | 7 | - | - | - | 52 |
| 9 | TAMBANGAN | 10 | 5 | 10 | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - | 50 |
| 10 | KOTANOPAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 55 |
| 11 | ULUPUNGKUT | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 29 |
| 12 | MUARA SIPONGI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 20 |
| 13 | BATANG NATAL | - | 3 | 6 | 6 | - | 2 | - | 3 | 5 | 5 | 2 | - | 32 |
| 14 | LINGGA BAYU | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 60 |
| 15 | NATAL | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | 50 |
| 16 | BATAHAN | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 37 |
| 17 | MUARA BATANG GADIS | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 |
| 18 | NAGA JUANG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 30 |
| 19 | PAKANTAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 50 |
| 20 | HUTABARGOT | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 20 |
| 21 | PUNCAK SORIK MARAPI | 5 | 4 | 8 | 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | - | - | 73 |
| 22 | RANTO BAEK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 30 |
| 23 | SINUNUKAN | 5 | 11 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 50 |
| JUMLAH | | 88 | 144 | 109 | 96 | 89 | 71 | 103 | 110 | 104 | 80 | 35 | 14 | 1,043 |

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO | KECAMATAN | PER - BULAN / KECAMATAN (TON) | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| | | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | TOTAL |
| 1 | SIABU | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 50 |
| 2 | BUKIT MALINTANG | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | 42 |
| 3 | PANYABUNGAN UTARA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 4 | PANYABUNGAN KOTA | - | 30 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 2 | 10 | 2 | 2 | - | 72 |
| 5 | PANYABUNGAN SELATAN | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 1 | 41 |
| 6 | PANYABUNGAN TIMUR | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 10 |
| 7 | PANYABUNGAN BARAT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 8 | LEMBAH SORIK MARAPI | 5 | 10 | 5 | - | - | - | 5 | 10 | 5 | - | - | - | 40 |
| 9 | TAMBANGAN | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 40 |
| 10 | KOTANOPAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 55 |
| 11 | ULUPUNGKUT | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
| 12 | MUARA SIPONGI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 20 |
| 13 | BATANG NATAL | - | 3 | 6 | 6 | - | 2 | - | 3 | 5 | 5 | 2 | - | 32 |
| 14 | LINGGA BAYU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 30 |
| 15 | NATAL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 30 |
| 16 | BATAHAN | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 37 |
| 17 | MUARA BATANG GADIS | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 |
| 18 | NAGA JUANG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 30 |
| 19 | PAKANTAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 40 |
| 20 | HUTABARGOT | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 20 |
| 21 | PUNCAK SORIK MARAPI | 2 | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | - | 3 | 10 | 1 | - | - | 43 |
| 22 | RANTO BAEK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 30 |
| 23 | SINUNUKAN | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 41 |
| JUMLAH | | 74 | 122 | 92 | 81 | 74 | 56 | 86 | 88 | 87 | 65 | 33 | 14 | 872 |

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PERKEBUNAN
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO | KECAMATAN | PER - BULAN / KECAMATAN (TON) | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| | | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | TOTAL |
| 1 | SIABU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 2 | BUKIT MALINTANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | PANYABUNGAN UTARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 4 | PANYABUNGAN KOTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PANYABUNGAN SELATAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | PANYABUNGAN TIMUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | PANYABUNGAN BARAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 8 | LEMBAH SORIK MARAPI | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 12 |
| 9 | TAMBANGAN | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 10 |
| 10 | KOTANOPAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ULUPUNGKUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 20 |
| 12 | MUARA SIPONGI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | BATANG NATAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | LINGGA BAYU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 30 |
| 15 | NATAL | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 20 |
| 16 | BATAHAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | MUARA BATANG GADIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | NAGA JUANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | PAKANTAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 20 | HUTABARGOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | PUNCAK SORIK MARAPI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 30 |
| 22 | RANTO BAEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | SINUNUKAN | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 |
| JUMLAH | | 14 | 22 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 22 | 17 | 15 | 2 | - | 171 |

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION